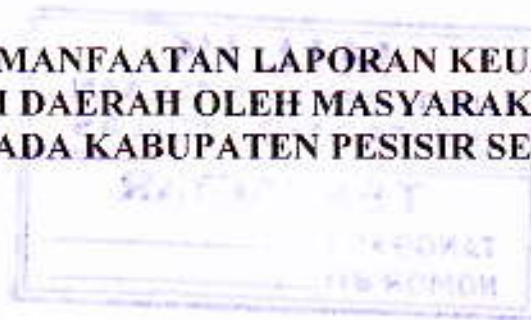


**ANALISIS PEMANFAATAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH OLEH MASYARAKAT DAN  
INVESTOR PADA KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Oleh

**DEWI SRI LESTARI**  
06 096 038



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan

**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIPLOMA IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

	No. Alumni Universitas	<b>DEWI SRI LESTARI</b>	No. Alumni Fakultas
Foto hitam Putih ukuran 4 X 6	a). Tempat/Tgl.lahir: Sukoharjo, 01/10/1979 b). Nama Orang Tua: Wignyo Sumarmo dan Tugiyem c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 05096038 f). Tgl.Lulus: 23 Juli 2009 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h). IPK: 3,69 i) Lama Studi : 32 Bulan j) Alamat orang tua: Siwal R104/03 Baki Sukoharjo Jawa Tengah		

**Analisis Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Masyarakat dan Investor Pada Kabupaten Pesisir Selatan**

Tugas Akhir DIV oleh Dewi Sri Lestari. Pembimbing 1. Amy Fontanella, SE. Ak., 2. Ulfy Maryati, SE, M.Ak, Ak.

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Responden ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan investor. Pertanyaan mendalam diajukan kepada setiap responden, dimulai dari pemahaman terhadap laporan keuangan pemerintah daerah secara umum sampai kepada pemanfaatannya.

Hasil analisa dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat terinstitusi dan investor di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari pengguna laporan keuangan pemerintah daerah belum memanfaatkan laporan keuangan pemerintah daerah secara optimal. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hanya menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan menilai kinerja pemerintah daerah.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 23 Juli 2009.

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

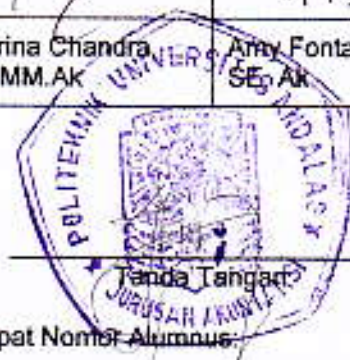
Tanda Tangan	1 	2 	3 	4 
Nama Terang	Dedy Djefris, SE, M.Ak, Ak	Irda Rosita, SE, MEc.ST, Ak	Novrina Chandra, SE, MM.Ak	Amy Fontanella, SE, Ak

Mengetahui:

Ketua Jurusan

Nurul Fauzi, SE, MM. Ak

Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

	<b>Petugas Fakultas/Universitas</b>	
Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Indonesia telah membawa perubahan di berbagai bidang. Jatuhnya orde baru dari pucuk pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan harapan besar untuk masyarakat Indonesia segera terbangunnya *Good Governance* dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, dengan sumber pembiayaan yang pada dasarnya berasal dari masyarakat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) ada delapan karakteristik dalam pelaksanaan *good governance*, yaitu: keterlibatan masyarakat, penegakan supremasi hukum, transparansi, respon yang cepat dari pemerintah, orientasi pada kepentingan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan, efisiensi dan efektivitas, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan terakhir memiliki pandangan ke depan (Mardiasmo:2002).

Transparansi menunjukkan ketersediaan informasi bagi publik yang dapat menurunkan tingkat ketidakpastian dan budaya korupsi dalam organisasi publik. Akuntabilitas mengharuskan institusi pemerintah mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat, organisasi publik harus akuntabel kepada semua pihak yang terkena dampak dari keputusan yang mereka ambil.

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Setiap organisasi publik mempunyai kewajiban menyediakan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban publik, baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Namun laporan keuangan tidak hanya alat pertanggungjawaban, tetapi juga berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk memenuhi karakteristik transparansi, laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan. Menurut Mahmudi (2002) terdapat dua alasan penting mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangannya. Pertama bagi pemakai internal laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Kedua bagi pemakai eksternal laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Jenis-jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Mahmudi 2007). Komponen dalam neraca yang antara lain adalah asset, hutang dan modal seharusnya dijadikan sebagai pertimbangan oleh investor maupun masyarakat. Asset mencerminkan kondisi kekayaan pemerintah daerah, dan potensi ekonomi sehingga dari informasi tersebut masyarakat maupun investor dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di daerah tersebut terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang dapat diperoleh.

## BAB LIMA

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya dijadikan alat untuk memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya, kondisi ekonomi, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja pemerintah kesesuaiannya dengan peraturan dan kesepakatan, serta memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun dalam kenyataannya berdasarkan penelitian ini adalah laporan keuangan hanya formalitas dalam rangka memenuhi kewajiban dalam ketentuan perundang-undangan saja. Masyarakat dalam hal ini diwakili oleh LSM sebagai organisasi swasta yang kegiatannya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat justru sangat kurang membutuhkan laporan keuangan daerah. Mereka melaksanakan kegiatannya dengan mempertimbangkan laporan-laporan lainnya yang mereka anggap lebih banyak menyediakan informasi yang mereka butuhkan.

Investor dalam menentukan keputusannya untuk berinvestasi juga tidak membutuhkan laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara faktor yang mereka pertimbangkan adalah kondisi keamanan daerah, stabilitas politik, kemudahan birokrasi dan peraturan daerah, dukungan infrastruktur dan potensi yang ada.

#### 5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Sampel yang digunakan masih sedikit akibat dari keterbatasan waktu dan tempat penelitian, sehingga tidak mewakili seluruh responden yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto (2008). *Manfaat Informasi Akuntansi (Laporan Keuangan)*
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2008. Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Halim Abdul, (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Hanafi dan Halim. (2005). *Analisis Laporan Keuangan*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN
- Harahap, S. (2004). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Mahsun, M., Sulistyawati, F., Purwanugraha, H. *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: BPFE
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*: Andi, Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004: Standar Akuntansi Pemerintahan
- Steccolini, Ileana (2002). *Local Government Annual Report: An Accountability Medium?*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pesisir Selatan Dalam Angka (2007). Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan